

ALTERNATIF PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN : SEBAGAI UPAYA MENCAPAI *CIVIC INTELLIGENCE*, *CIVIC PARTICIPATION* DALAM *CIVIC RESPONSIBILITY*

Umi Chotimah
PS PKN FKIP Universitas Sriwijaya

Abstrak

Sebagai salah satu matapelajaran wajib bagi seluruh peserta didik mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai ke pendidikan tinggi, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) mempunyai posisi yang strategis dalam pencapaian fungsipendidikan nasional yaitu mengembangkankemampuan danmembentuk karakter serta peradabanbangsa yangmartabat dalam rangkamencerdaskankehidupan bangsa. Hal ini mengingat PKn mempunyai visi sebagai sarana pembinaan watak bangsa (*nation and character building*) dan pemberdayaan warganegara, sedangkan misinya adalah membentuk warganegara yang baik. Dengan kata lain PKn sebagai pendidikan yang mengarah pada terbentuknya warga negara yang baik danbertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai dan dasar negara Pancasila, dimana secara konseptualepistemologis,pendidikan Pancasila dapat dilihat sebagai suatu *integrated knowledgesystem* yang memiliki misi menumbuhkanpotensi peserta didik agar memiliki *civic intelligence*, *civic responsibility* dan *civic participation* sebagai warga negara Indonesia dalam konteks watak danperadaban bangsa Indonesia yang ber-Pancasila.Oleh karenanya pembelajaran PKn perlu dilaksanakan sesuai dengan visi dan misinya, yaitu melalui penerapan alternatif pembelajaran yang relevan diantaranya *Portfolio Based Model*, *Considation Model*, *VCT*, *Cognitive Developmental Model*, *Reflective Inquiry*, *Inquiry Social*, *PKKBI*, *Role Playing*.

Kata Kunci : *nation and character building*, *integrated knowledge system*, *civic intelligence*, *civic responsibility* dan *civic participation*

PENDAHULUAN

Pendidikan sebagai sarana transmisi pengetahuan, nilai dan sikap adalah untuk pengembangan pribadi seseorang dalam mencapai kematangan dan kedewasaan. Oleh karena itu pendidikan tidak hanya ingin mengembangkan ilmu, keterampilan dan teknologi; tetapi juga mengembangkan aspek-aspek lain misalnya kepribadian, etika moral dan lain-lain. Sukmadinata (1988) menyatakan bahwa pendidikan merupakan suatu interaksi antara pendidik dengan peserta didik dalam upaya membantu menguasai tujuan-tujuan pendidikan. Tujuan dari pendidikan di Indonesia dimuat di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) No. 20 Tahun 2003 hal 3 yang menyatakan bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang martabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa pendidikan memiliki fungsi yang paling penting bagi kehidupan bangsa Indonesia. Dengan demikian kemajuan bangsa Indonesiadipengaruhi oleh kualitas pendidikannya, lebih-lebih lagi dalam era globalisasi yang membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas; baik dari segi material maupun spiritual; menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kreatif, inovatif, adaptif; serta berkepribadian yang baik. SDM yang berkualitas adalah SDM yang memiliki pribadi yang tangguh, berwawasan keunggulandi bidangnya, terampil, memiliki motif berprestasi tinggi, dan moral yang kuat. Dalam arti bahwa SDM yang tidak hanya mampu menguasai dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan tetapi juga terampil di dalam memecahkan masalah-masalah yang muncul dari adanya perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam tata kehidupan masyarakat yang berdimensi lokal, nasional, regional, dan global (Tilaar 1999, Depdiknas, 2002). SDM Indonesia yang berkualitas yang diharapkan oleh bangsa Indonesia adalah SDM yang

bukan hanya berkualitas dari segi penguasaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS), apakah berkualitas dari segi spiritual. Artinya penguasaan ipteks tersebut tidak akan berarti apabila tidak didukung dengan sikap dan perilaku yang baik, yang tetap berpegang pada kepribadian bangsa Indonesia yaitu pada nilai-nilai luhur Pancasila. Jadi kemajuan yang diharapkan oleh bangsa Indonesia adalah kemajuan yang tetap dilandasi nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Tantangan terhadap pendidikan pada masa kini adalah mendidik anak agar tidak hanya memiliki kemampuan fisik tetapi juga harus memiliki kelembutan perilaku dan sikap arif dan penyabar yang mana hal tersebut adalah tujuan dari pendidikan nilai (Koentjaraningrat 1999, Ahmad Sanusi 2004).

Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut maka dibutuhkan rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, atau disebut kurikulum. Kurikulum mengandung suatu artikel tentang pengalaman-pengalaman belajar yang diharapkan bisa diperoleh siswa selama mengikuti pendidikan di sebuah institusi. Sebagai salah satu komponen yang penting dalam proses pendidikan, kurikulum berisikan tujuan, isi dan metode pembelajaran dan evaluasi yang memberi arah ke bentuk aktivitas pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Melalui kurikulum, diharapkan akan terbentuk kepribadian bangsa sesuai dengan yang diidealisasikan (Sukmadinata, 1988). Kurikulum adalah panduan yang harus digunakan oleh guru dalam mengajar (Badan Standar Nasional Pendidikan Tahun 2005). Kurikulum di desain sesuai dengan tingkat satuan pendidikan yaitu Pendidikan Dasar pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi. Dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, diantaranya menyebutkan bahwa: kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

PKn pada hakikatnya adalah pendidikan yang mengarah pada terbentuknya warga negara yang baik dan bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai dan dasar negara Pancasila. Atau dengan kata lain merupakan pendidikan Pancasila dalam praktek. Secara konseptual epistemologis, pendidikan Pancasila dapat dilihat sebagai suatu *integrated knowledge system* (Hartonian: 1996, Winataputra: 2001) yang ber-Pancasila (Winataputra, 2001, 2006). PKn mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku yang memancarkan imandan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari bermacam agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mendukung persatuan bangsa dalam masyarakat yg beragam budaya dan kepentingan bersama diatas golongan dan perorangan, sehingga perbedaan pemukiman dapat diatas dengan cara mesyuarat mufakat dan perilaku yang mendukung upaya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Visi dari PKn adalah sebagai sarana pembinaan karakter bangsa (*nation and character building*) dan pemberdayaan warga, sedangkan misinya adalah membentuk warga negara yang baik.

Setiap negara pasti menginginkan warganya menjadi warga negara yang baik. Negara yang baik adalah warga negara yang sanggup melaksanakan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bernegara, dilandasi oleh kesadaran politik, kesadaran hukum, dan kesadaran moral. Negara yang baik tidak hanya baik dalam kehidupan sosial tetapi memiliki spriritualitas yang baik, antara lain: beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; sadar dan mampu membangun dan melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sebagai manusia; masyarakat berbangsa dan bernegara, taat pada *rule of law*, demokratis dan partisipatoris aktif, kreatif dan positif, dalam kebhinekaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam jalur persekolahan, pasokan pengetahuan dan kesadaran tentang hak dan kewajiban rakyat diberikan melalui PKn (Kosasih Djahiri 1992, Suria Kusumah 1999, Syaifulloh Fatah 1999:29).

Krisis multidimensional yang dialami Indonesia pada tahun 1998 yang lalu telah berpengaruh terhadap upaya bangsa Indonesia dalam mewujudkan warga negara yang baik, sebab krisis tersebut telah membawa dampak luas terhadap kehancuran pola kehidupan masyarakat Indonesia lebih-lebih lagi dengan adanya efek negatif dari globalisasi, terbukti dengan akhir-akhir ini banyak keluhan masyarakat tentang menurunnya tatasusila, etika dan kreativitas karena pendidikan budaya dan karakter bangsa lemah. Akibatnya sebagian besar siswa sekolah yang berkelakuan tidak sopan dan kadang-kadang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, etika dan budaya Indonesia. Masyarakat Indonesia khususnya anak muda banyak yang lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia, karena gaya hidupnya cenderung meniru budaya barat yang oleh masyarakat dunia dianggap sebagai model. Dari kenyataan yang demikian itu, maka sudah seharusnya pemerintah (maupun masyarakat) mengambil langkah-langkah usaha perlu segera diupayakan solusinya agar tidak menjadi

permasalahan yang lebih serius lagi. Salah satu langkah yang ditempuh oleh pemerintah adalah dengan menetapkan pengembangan kemampuan dan membentuk karakter sebagai fungsi pendidikan nasional Indonesia sebagaimana disebutkan di dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 3.

Untuk mengaktualisasikan akan pentingnya pendidikan karakter, sejak tahun 2010 pemerintah Indonesia melalui Menteri Pendidikan Nasional, mengatur pendidikan karakter sebagai tema peringatan hari pendidikan nasional. UU RI No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, sudah ditetapkan jauh sebelum kebijakan nasional pembangunan karakter bangsa, yaitu terwujudnya karakter bangsa yang hebat, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan Pancasila, yang dilengkapi dengan karakter dan perilaku manusia/masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis dan berorientasi IPTEKS. Tiga fungsi utama dari pembangunan karakter yaitu: pertama, fungsi pembentukan dan pengembangan potensi, artinya untuk membentuk manusia atau warga negara Indonesia yang berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik sesuai dengan filsafat hidup Pancasila. Kedua, fungsi perbaikan dan penguatan, artinya untuk memperbaiki dan memperkuat peran keluarga, unit pendidikan, masyarakat dan pemerintah untuk bertanggung jawab dalam pengembangan potensi warga negaranya menuju bangsa yang maju, mandiri dan sejahtera. Ketiga, fungsi filter, yaitu memilah budaya bangsa sendiri dan menyaring budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat.

Ketiga fungsi di atas dapat dilakukan dengan beberapa usaha, yaitu: pertama, penguatan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi Negara. Kedua memperkuat nilai dan norma UUD 1945; ketiga, penguatan komitmen kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia; keempat, penguatan nilai-nilai keragaman sesuai dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika; kelima, penguatan keunggulan dan daya saing bangsa. Salah satu upaya penguatan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara dan memperkuat nilai dan UUD 1945 adalah melalui pengajaran di sekolah-sekolah melalui mata pelajaran PKn. Dengan demikian bahwa saat pembelajaran PKn dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang sebenarnya, dapat mengembangkan karakter bangsa.

CIVIC INTELLIGENCE, CIVIC PARTICIPATION DALAM CIVIC RESPONSIBILITY

Proses pembangunan karakter bangsa (*national character building*) yang sejak proklamasi menjadi prioritas kini perlu direvitalisasi agar sesuai dengan arah dan pesan konstitusi negara Republik Indonesia. PKn sebagai salah satu matapelajaran yang wajib bagi seluruh peserta didik mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, mempunyai peranan yang strategis dalam menerapkan peembangunan karakter.

Pada hakikatnya pembangunan karakter bangsa ini mengarah pada penciptaan suatu masyarakat Indonesia yang menempatkan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai titik sentral. Dalam proses itulah pembangunan karakter bangsa kembali dirasakan sebagai kebutuhan yang mendesak dan memerlukan pola atau paradigma baru. Tugas PKn dengan paradigma baru ini mengembangkan pendidikan demokrasi mengemban tiga fungsi pokok, pertama mengembangkan kecerdasan warganegara (*civic intelligence*), kedua membina tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*), dan ketiga mendorong partisipasi warga negara (*civic participation*).

Pembelajaran PKn merupakan proses pendidikan secara utuh dan menyeluruh terhadap pembentukan karakter individu sebagai warga negara yang cerdas dan baik. Pembelajaran PKn harus diinternalisasikan secara utuh dan menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan (baik pribadi/keluarga, sekolah, masyarakat maupun bangsa dan negara) dengan tujuan untuk membentuk karakter siswa sebagai warga negara yang cerdas dan baik, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37 menyebutkan bahwa dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi itu salah satunya wajib memuat PKn.

Keberadaan PKn sangatlah penting pada pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Sesuai dengan tujuan pembelajaran PKn. Secara umum tujuan negara mengembangkan PKn adalah agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik (*to be good citizenship*), yakni warga negara yang memiliki kecerdasan (*civic intelligence*), baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual; memiliki rasa bangga dan bertanggung jawab (*civic responsibility*); dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan

bermasyarakat dan bernegara (*civic participation*) agar tumbuh rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dengan kata lain, secara umum dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran PKn adalah untuk mendidik warga negara agar menjadi warga negara yang dapat digambarkan sebagai warga negara yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, saling menghormati, menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, memupuk rasa kekeluargaan, memupuk rasa bangga dan cinta terhadap bangsa serta tanah air, demokratis, cakap dan bertanggung jawab, berwawasan luas, menaati hukum dan norma yang berlaku dalam masyarakat, berbudi pekerti luhur, memiliki kecerdasan dan keterampilan intelektual, spiritual, sikap/emosional, sehingga dapat mengembangkan potensi serta mampu memposisikan diri dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, bahkan dalam pergaulan antar bangsa.

Mata pelajaran PKn berfungsi sebagai wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan Pasal 31 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sudah saatnya diarahkan untuk membangun daya kreativitas belajar siswa melalui pendidikan yang demokrasi. Oleh karena secara konseptual pendidikan kewarganegaraan adalah suatu bentuk pendidikan yang memuat demokrasi yang berlaku universal dimana prinsip umum demokrasi mengandung pengertian mekanisme sosial politik yang dilakukan melalui prinsip dari, oleh dan untuk warga negara dalam hal ini siswa di sekolah yang menjadi dasar dan tujuannya.

ALTERNATIF PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Pembelajaran merupakan suatu proses serta perbuatan yang ditempuh guru dan siswa untuk mewujudkan proses belajar secara efektif dan efisien. Oleh karenanya pembelajaran PKn perlu memperhatikan komponen-komponen pengaturan guru dan siswa, mengolah dalam pesan, tujuan belajar evaluasi yang dikembangkan. Keempat komponen tersebut tidak dapat dipisahkan dalam suatu rangkaian kegiatan pembelajaran. Agar pembelajaran PKn dapat mencapai ketiga komponen pokok yang harus dikembangkan *Civic knowledge*, *Civic skill*, *Civic disposition* maka seorang guru PKn perlu melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan pengembangan ketiga komponen tersebut.

Djahiri (Suwardi, 2009:53) menyatakan bahwa proses pembelajaran PKn merupakan proses kegiatan belajar siswa yang direkayasa oleh seluruh komponen belajar yang meliputi guru, materi, metode, media, sumber dan evaluasi pembelajaran. Dengan kata lain, proses pembelajaran PKn dapat dimaknai sebagai proses interaksi antara siswa dan guru dalam mengoperasionalkan materi, metode, media, sumber, dan evaluasi pembelajaran.

Oleh karenanya beberapa alternatif model pembelajaran yang dapat digunakan dalam rangka mencapai *civic intelligence*, *civic responsibility* & *civic participation*, adalah dengan menggunakan *Portfolio Based Model*, *Considation Model*, *VCT*, *Cognitive Developmental Model*, *Reflective Inquiry*, *Inquiry Social*, *PKKBI*, *Role Playing*.

a. *Portfolio Based Model*

Menurut ERIC Digest (2000), "*Portfolios are used in various professions together typical...; art students assamble a portfolio for an art class*". Portofolio merupakan kumpulan hasil karya siswa sebagai hasil belajarnya. Portofolio, selain sangat bermanfaat dalam memberikan informasi mengenai kemampuan dan pemahaman siswa serta memberikan gambaran mengenai sikap dan minat siswa terhadap pelajaran yang diberikan, juga dapat menunjukkan pencapaian atau peningkatan yang diperoleh siswa dari proses pembelajaran (Stiggins, 1994 : 20). Melalui model pembelajaran portofolio, selain diupayakan dapat membangkitkan minat belajar siswa secara aktif, kreatif, juga dapat mengembangkan pemahaman nilai-nilai kemampuan berpartisipasi secara efektif, serta diiringi suatu sikap tanggung jawab Implementasi model pembelajaran portofolio akan menjadikan PBM PKn yang sangat menyenangkan bagi siswa, bila pembelajaran tersebut beserta komponennya memiliki kegunaan/manfaat bagi siswa dan kehidupannya.

Selain hal-hal positif, keunggulan, dan kelebihan model portofolio di atas, kita pun harus mencermati beberapa kelemahan, peluang, dan ancaman yang terdapat di dalam proses pembelajaran PKn in action, seperti dipaparkan di bawah ini : 1). Diperlukan waktu yang cukup banyak, bahkan diperlukan waktu di luar jam pembelajaran di sekolah, sehingga untuk menuntaskan satu studi kasus

atau suatu kebijakan publik diperlukan lebih dari 20 jam pelajaran seperti yang telah ditentukan dalam jadwal;2). Kurangnya pengetahuan/daya nalar guru yang bersangkutan;3). Belum diberikannya hak otonomi mengajar sebagai pengembang kurikulum praktis di kelas; 4). Diperlukan tenaga dan biaya yang cukup besar;5). Kurangnya jalinan komunikasi antara pihak sekolah, keluarga, dan masyarakat khususnya para birokrat/instansi yang dikunjungi oleh para siswa untuk dimintai keterangannya; dan6). Belum terbiasanya pembiasaan jalinan kerjasama kelompok tim para siswa, dengan kesadaran, karena jika ide atau gagasan terlalu banyak dan tidak dapat dipertemukan, masalah akan sulit dipecahkan.

b. Consideration Model.

Model inidiekembangkan oleh PAUL (seorang humanis), menurutnya, bahwa pembentukan moral tidak sama dengan pengembangan kognitif yang rasional. Pembentukan moral adalah pembentukan kepribadian tidak sama dengan pembentukan intelektual. Adapun langkah-langkah penerapannya adalah sebagai berikut :

1. Cari suatu masalah yang mengandung konflik, yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ciptakan situasi "seandainya siswa ada dalam masalah tersebut".
2. Mintalah siswa untuk menganalisis situasi masalah dengan melihat bukan hanya yang tampak, tetapi juga yang tersirat dalam permasalahan tersebut, misalnya perasaan, kebutuhan, dan kepentingan orang lain.
3. Mintalah siswa untuk menuliskan tanggapannya terhadap permasalahan yang dihadapi. Hal ini dimaksudkan agar siswa dapat menelaah perasaannya sendiri sebelum ia mendengar respons orang lain untuk dibandingkan.
4. Ajak siswa untuk menganalisis respons orang lain serta membuat kategori sari setiap respons yang diberikan siswa.
5. Doronglah siswa untuk merumuskan akibat dari setiap tindakan yang diusu;an siswa. Dalam tahap ini siswa diajak berpikir tentang segala kemungkinan yang akan timbul sehubungan dengan tindakannya. Guru perlu menjaga agar siswa dapat menjelaskan argumennya secara terbuka serta dapat saling menghargai pendapat orang lain. Diupayakan agar perbedaan pendapat tumbuh dengan baik sesuai dengan titik pandang yang berbeda
6. Mengajak siswa untuk memandang permasalahan dari berbagai sudut (interdisipliner) untuk menambah wawasan agar mereka dapat menimbang sikap tertentu sesuai dengan nilai yang dimilikinya.
7. Dorong siswa agar merumuskan sendiri tindakannya yang harus dilakukan sesuai dengan pilihannya berdasarkan pertimbangannya sendiri. Guru hendaknya tidak menilai benar atau salah atas pilihan siswa. Yang diperlukan adalah guru dapat membimbing mereka menentukan pilihan yang lebih matang sesuai dengan pertimbangannya sendiri.

c. VCT

Salah satu alternative model pembelajaran afektif ialah VCT (*Values Clarification Techniques*). Kata *Value* berarti nilai yang berasal dari kata *Vlure* (bahasa Latin), yang berarti baik atau kuat. Dari pengertian dasar ini kemudian diperluas menjadi sesuatu yang disenangi, diinginkan, dicita-citakan dan disepakati. Karena itu lahirlah ungkapan sesuatu itu menilai. Maka nilai adalah sesuatu kepercayaan yang bersumber pada sistem nilai seseorang mengenai apa yang berharga dan apa yang tidak, sedangkan arti *Clarification Technique* adalah teknik mengklarifikasi-kan (memperjelas, mengungkapkan, memerinci) nilai.

Selanjutnya *Value Clarification Technique (VCT)* diartikan sebagai tehnik mengklarifikasi atau pengungkapan nilai atau tehnik pembinaan nilai. Tehnik ini merupakan salah satu cara penyajian materi pelajaran untuk membina siswa agar mampu mengidentifikasi, mengklarifikasi, menilai dan mengambil keputusan nilai mana yang akan dipilihnya secara nalar dan penuh keyakinan. Sama halnya dengan menggunakan metode lainnya, untuk menggunakan VCT, guru juga perlu mempertimbangkan TPK, materi pelajaran, keadaan siswa, fasilitas, media dan waktu.

Toyibin dan Djahiri (1997:129), menyatakan bahwa *VCT* merupakan singkatan dari *Value Clarification Technique*. Kata *Value* berarti nilai yang berasal dari kata *Vlure* (bahasa latin), yang artinya baik atau kuat. Sedangkan arti *Clarification Technique* adalah teknik mengklarifikasi (memperjelas, meng-ungkapkan, memerinci) nilai. Selanjutnya *Value Clarification Technique* atau teknik mengklarifikasi nilai (TMN) adalah suatu nama atau label dari suatu model pendekatan dan

strategi belajar mengajar khusus untuk pendidikan nilai dan moral atau pendidikan afektif. Model *VCT* ini adalah model yang khas yang dikembangkan untuk kepentingan program pembelajaran yang menyangkut kawasan afektif pada umumnya dan Pendidikan Kewarganegaraan pada khususnya.

Dari beberapa definisi *VCT* menurut pendapat para ahli di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pendekatan pembelajaran ini adalah suatu pendekatan klarifikasi nilai yang terletak pada proses penilaian yang bertujuan untuk menata situasi agar siswa mendapat nilai-nilai mereka sendiri dengan cara terlibat dalam memilih, menghargai dan berbuat dalam suatu tindakan dan keputusannya sendiri.

Sanjaya (2006:284), menyatakan bahwa melalui model *VCT*, pola pengajaran menjadi tidak monoton. Guru tidak mendominasi seluruh waktu dan peserta didik, dan perataan aktivitas potensi diri serta keanekaragaman kemampuan peserta didik lebih dapat terlayani. Kelebihan lain dari model *VCT*, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengukur atau mengetahui tingkat kesadaran siswa tentang suatu nilai.
2. Membina kesadaran siswa tentang nilai-nilai yang dimilikinya baik tingkatannya maupun sifatnya (positif dan negatifnya) untuk kemudian dibina kearah peningkatan dan pembetulannya.
3. Untuk menanamkan nilai-nilai tertentu kepada siswa melalui cara yang rasional dan diterima siswa, sehingga pada akhirnya nilai tersebut akan menjadi milik siswa.
4. Melatih siswa bagaimana cara menilai, menerima, serta mengambil keputusan terhadap sesuatu persoalan dalam hubungannya dengan kehidupan sehari-hari di masyarakat.

Langkah-langkah model pembelajaran *VCT* sebenarnya tergantung pada teknik yang akan kita diambil, akan tetapi secara umum dapat dijelaskan. Menurut Djahiri (1985:62-63), langkah-langkah model *VCT* sebenarnya tergantung pada teknik yang di ambil, akan tetapi *secara umum* dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Penerimaan stimulus

Stimulus harus bersifat dilematis dan memuat konflik nilai/moral.

2. Menyajikan Stimulus, dapat melalui kegiatan:

- Mengidentifikasi masalah (konflik nilai/moral)
- Mengidentifikasi fakta yang di muat dalam stimulus
- Menentukan kesamaan dalam pengertian
- Menentukan masalah utama yang akan dipecahkan

3. Menentukan Pilihan;

Siswa diberi posisi kesempatan untuk menanggapi melalui :

- Pilihan/posisi perorangan
- Pilihan/posisi kelompok
- Mengklarifikasi pilihan/posisi tersebut

4. Menguji Alasan;

Dilakukan dengan cara :

- Meminta argumentasi siswa kelompok kelas
- Pemantauan argumentasi melalui mempertentangkan argumen demi argument, penerapan kejadian secara analogis, mengkaji akibat-akibat penerapan tersebut, dan mengkaji kemungkinan dari kegiatan

5. Penyimpulan dan Pengarahan;

Dapat melalui :

- Kesimpulan siswa/kelompok kelas
- Kesimpulan dan pengarahan oleh guru sesuai dengan target materi pelajaran (konsep nilai/norma/moral)

6. Tindak Lanjut;

Dapat berupa :

- Kegiatan perbaikan /remedial/pengayaan
- Kegiatan ekstra/latihan penerapan uji coba.

c. Cognitive Developmental Model

Model ini dikembangkan oleh : Lawrence Kohlberg, model ini banyak diilhami oleh pemikiran John Dewey dan Jean Piaget, yang berpendapat bahwa perkembangan manusia terjadi

sebagai proses dari restrukturisasi kognitif yang berlangsung secara berangsur-angsur menurut aturan menurut urutan tertentu. Tujuan yang ingin dicapai dari model ini ada dua hal yang utama, yaitu :

- 1) membantu siswa dalam membuat pertimbangan moral yang lebih kompleks berdasarkan kepada nilai yang lebih tinggi.
- 2) mendorong siswa untuk mendiskusikan alasan-alasannya ketika memilih nilai dan posisinya dalam suatu masalah moral (Superka, et. al., 1976; Banks, 1985).

Sedangkan manfaatnya adalah mendorong siswa untuk berpikir aktif tentang masalah-masalah moral dan dalam membuat keputusan-keputusan moral. Perkembangan moral menurut pendekatan ini dilihat sebagai perkembangan tingkat berpikir dalam membuat pertimbangan moral, dari suatu tingkat yang lebih rendah menuju suatu tingkat yang lebih tinggi (Elias, 1989).

1. Cari suatu masalah yang mengandung konflik, yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ciptakan situasi “seandainya siswa ada dalam masalah tersebut”.
2. Mintalah siswa untuk menganalisis situasi masalah dengan melihat bukan hanya yang tampak, tetapi juga yang tersirat dalam permasalahan tersebut, misalnya perasaan, kebutuhan, dan kepentingan orang lain.
3. Mintalah siswa untuk menuliskan tanggapannya terhadap permasalahan yang dihadapi. Hal ini dimaksudkan agar siswa dapat menelaah perasaannya sendiri sebelum ia mendengar respons orang lain untuk dibandingkan.
4. Ajak siswa untuk menganalisis respons orang lain serta membuat kategori dari setiap respons yang diberikan siswa.

e. Reflective Inquiry

Sebenarnya model ini merupakan basis model program “*We The People...Project Citizen and the Constitution*” yang dikembangkan atas dasar merupakan suatu program pembelajaran tentang sejarah dan prinsip-prinsip demokrasi di Amerika, dimana reflective inquiry menjadi dasar dari program tersebut.

Reflective inquiry berkenaan dengan kemampuan individu dalam mengkonstruksi suatu makna. Inkuiri itu sendiri menyatu dengan reflektif dan kolaboratif sebagai aspek dari berpikir dan belajar. Dewey (1938) mengatakan, bahwa reflektif inkuiri dibuat penting, sebagaimana sebuah pengetahuan, ia bukanlah pada posisi yang tetap, untuk itu siswa harus aktif dan menjadi peserta yang bertanggung jawab. Langkah-langkah belajar *reflective inquiry* memiliki menurut Winataputra dan Budimansyah (2007:241) :

- identifikasi masalah kebijakan publik yang ada dalam masyarakat
- pemilihan masalah sebagai fokus kajian kelas
- pengumpulan informasi terkait masalah yang menjadi fokus kajian kelas
- pengembangan suatu portofolio kelas, dan
- menyajikan portofolio kelas dalam suatu simulasi dengan pendapat.
- melakukan kajian pengendapan atas pengalaman belajar yang dilakukan. pada langkah terakhir, kembali ke kelas untuk melakukan refleksi atau pengendapan dan perenungan mengenai hasil belajar yang dicapai melalui seluruh kegiatan tersebut.

f. inquiry social

inquirysocial merupakan strategi pembelajaran dari kelompok sosial (*social family*) subkelompok konsep masyarakat (*concept of society*). Subkelompok ini didasarkan pada asumsi bahwa metode pendidikan bertujuan untuk mengembangkan anggota masyarakat ideal yang dapat hidup dan dapat mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, siswa harus diberi pengalaman yang memadai bagaimana caranya memecahkan persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat. Melalui pengalaman itulah setiap individu akan dapat membangun pengetahuan yang berguna bagi diri dan masyarakat-nya.

PRAKTEK KEWARGANEGARAAN KAMI BANGSA INDONESIA (PKKB)

Model ini didaptasi dari Model “THE PEOPLE...THE PROJECT CITIZEN” yang didasarkan pada pendekatan berpikir kritis atau reflektif yang dirintis oleh John Dewey (1900) ataupun model “*Reflective Inquiry*” oleh Barr (1978). Model merupakan suatu program pembelajaran tentang Sejarah dan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional di Amerika Serikat di tingkat *Elementry*

School, Middle School maupun High School. Pengembangannya dimulai tahun 1995-1996, yang melibatkan 460 guru di 45 negara bagian mencakup 1000 kelas dengan 28.000 siswa.

PKKBI secara terbatas sudah dirintis penerapannya di 6 SLTP oleh Kantor Wilayah Pendidikan Nasional Jawa Barat bekerjasama dengan *Center for Indonesian Civic Education (CICED)* pada tahun 2001. Secara nasional tahun 2001-2002 oleh Pendidikan Dasar dan Menengah, dilakukan di 70 SLTP dan 3 SMU di 15 propinsi. Tahun 2002 oleh Center for Civic Education Indonesia (CCEI) diterapkan di 250 SLTP di 12 propinsi. Tahun 2003-2006, dilaksanakan di 64 kabupaten/kota yaitu 512 SD, 512 SMP dan 512 SMA. Jadi dari tahun 2001-2006 sudah dilakukan di 1786 sekolah (SD, SMP dan SMA).

Tujuan PKKBI adalah untuk memberikan pengalaman belajar kepada para peserta didik, langkah-langkah dan metode yang digunakan di dalam proses politik.

1. Mengidentifikasi masalah kebijakan publik yang ada di dalam masyarakat.
Pada langkah ini kelas difasilitasi untuk mengidentifikasi berbagai masalah yang ada di lingkungan masyarakat melalui pengamatan, wawancara dan studi dokumentasi yang dilakukan secara kelompok.
2. Memilih masalah sebagai fokus kajian kelas.
Pada langkah ini kelas difasilitasi untuk mengkaji berbagai masalah itu dan kemudian memilih satu masalah yang paling layak dipecahkan.
3. Mengumpulkan informasi terkait masalah yang menjadi fokus kajian kelas. Pada langkah ini kelas difasilitasi untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah tersebut dari berbagai sumber informasi yang relevan dan tersedia, misalnya perpustakaan, media massa, profesional, ahli, pejabat pemerintahan, organisasi non pemerintah, tokoh/anggota masyarakat
4. Mengembangkan suatu portofolio kelas.
Pada langkah ini kelas mengembangkan portofolio berupa himpunan hasil kerja kelompok dalam rangka pemecahan masalah tersebut dan menyajikannya secara keseluruhan dalam bentuk panel pameran yang dapat dilihat bersama, yang melukiskan saling keterkaitan masalah, alternatif kebijakan, dukungan atas alternatif kebijakan, dan rencana tindakan untuk melaksanakan tindakan tersebut.
5. Menyajikan portofolio kelas dalam simulasi dengar pendapat.
Pada langkah ini, keseluruhan portofolio yang telah dikembangkan kemudian disajikan dan dipamerkan kepada warga sekolah dan masyarakat.
6. Melakukan kajian pengendapan atas pengalaman belajar yang dilakukan.
Pada langkah terakhir, kembali ke kelas untuk melakukan refleksi atau pengendapan dan perenungan mengenai hasil belajar yang dicapai melalui seluruh kegiatan tersebut

ROLE PLAYING (BERMAIN PERAN)

Model pembelajaran Role playing, merupakan salah satu model yang dapat digunakan dalam pembelajaran PKn guna mencapai visi dan misi PKn. Menurut (Jill Hadfield, 1986, role playing adalah sejenis permainan gerak yang didalamnya ada tujuan, aturan dan sekaligus melibatkan unsur senang. Dalam role playing murid dikondisikan pada situasi tertentu di luar kelas, meskipun saat itu pembelajaran terjadi di dalam kelas, dengan menggunakan bahasa Inggris. Role Playing juga dimaksudkan sebagai suatu bentuk aktivitas dimana pembelajar membayangkan dirinya seolah-olah berada di luar kelas dan memainkan peran orang lain (Basri Syamsu, 2000).

Dalam penerapannya, siswa diperlakukan sebagai subyek pembelajaran, secara aktif melakukan praktik-praktik berbahasa (bertanya dan menjawab dalam bahasa Inggris) bersama teman-temannya pada situasi tertentu. Belajar efektif dimulai dari lingkungan yang berpusat pada diri murid (Departemen Pendidikan Nasional, 2002). Lebih lanjut prinsip pembelajaran memahami kebebasan berorganisasi, dan menghargai keputusan bersama, murid akan lebih berhasil jika mereka diberi kesempatan memainkan peran dalam bermusyawarah, melakukan pemungutan suara terbanyak dan bersikap mau menerima kekalahan sehingga dengan melakukan berbagai kegiatan tersebut dan secara aktif berpartisipasi, mereka akan lebih mudah menguasai apa yang mereka pelajari (Boediono, 2001). Jadi, dalam pembelajaran murid harus aktif, karena tanpa adanya aktivitas, maka proses pembelajaran tidak mungkin terjadi.

PENUTUP

Dengan perubahan paradigama dari matapelajaran PKn dari paradigma lama menjadi paradigma baru, dimana tugas pokok dalam paradigma baru PKn yaitu pertama mengembangkan kecerdasan warga negara (*civic intelligence*), kedua membina tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*), dan ketiga mendorong partisipasi warga negara (*civic participation*).Sehubungan dengan hal itulah maka proses pembelajaran PKn perlu dirancang dengan agar proses interaksi antara siswa dan guru dalam mengoperasionalisasikan materi, metode, media, sumber, dan evaluasi pembelajaran dapat mengacu pada pada ketercapaian ketiga tugas pokok diatas, tentu saja dengan tetap memperhatikan relevansinya dengan standar kompetensi, kompetensi dasar serta tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Oleh karenanya, beberapa alternatif pembelajaran PKn yang dapat diterapkan dalam pembelajaran PKn diantaranya adalah: *Portfolio Based Model, Consideration Model, VCT, Cognitive Developmental Model, Reflective Inquiry, Inquiry Social, PKKBI, Role Playing*.

DAFTAR PUSTAKA

- Banks, J.A. 1985. *Teaching Strategies for The Social Studies*. New York: Longman
- Budimansyah, Suryadi Dasim. 2007. "Pendidikan Demokrasi sebagai Konteks Civic Education di Negara Berkembang", dalam *Acta Civicus*, Vol 1 No. 1, Oktober 2007.
- 2007. "Warganegara Multidimensional Dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan", dalam *PKn Progresif: Jurnal Pemikiran dan Penelitian PKn*, Vol. 2 No.2, Desember 2007, 157-177.
- 2009. *Pembelajaran Pendidikan Kesadaran Kewarganegaraan Multidimensional*. Bandung: Genesindo.
- Djahiri, Kosasih. 2006. *Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium PKn FPIPS_UPI.
- Elias, J. L. 1989. *Moral education: secular and religious*. Florida: Robert E. Krieger Publishing Co., Inc
- Basari, Hasan / Bernhard Dahm, *Sukarno dan perjuangan kemerdekaan*, Jakarta : LP3ES, 1987. Judul asli : *Sukarno and the struggle for Indonesia*
- Fedyani Saifuddin & Mulyawan Karim. 2008. *Refleksi Karakter Bangsa*. Jakarta : Forum Kajian Antropologi Indonesia
- Fokusmedia. 2005. *Standar Nasional Pendidikan (SNP) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005*. Bandung: Fokusmedia
- Nuansa Aulia. 2003. *Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003*. Jakarta: Nuansa Aulia.
- Sanjaya, Wina. 2008. *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*. Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group.
- Sanusi, Achmad. 2004. *Kapita Selekta Pembahasan Masalah-Masalah Sosial*. Bandung: Depdikbud, Fakultas Pasca Sarjana IKIP Bandung.
- Setiawan, Deny. 2009 "Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi Di Era Global", dalam *Acta Civicus*, Vol. 2 No. 2, April 2009. Hal 127-144.
- Sinar Grafika. 2001. *Undang-Undang nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) tahun 2000-2004*. Jakarta: Sinar Grafika.
- 2006. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (PERMENDIKNAS) 2006 Tentang Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Superka, D.P. 1973. *A typology of valuing theories and values education approaches*. Doctor of Education Dissertation. University of California, Berkeley
- Syaifullah_Wuryan,S. 2008. *Ilmu Kewarganegaraan "Civics"*. Bandung: Laboratorium PKn
- Syaodih, Nana Sukmadinata. (1988). *Prinsip dan Landasan Pengembangan Kurikulum*. Jakarta : Depdikbud, Dirjen Pendidikan Tinggi, P2LPTK.
- Tilaar, H.A.R.. (1999). *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Abad 21*. Magelang: Tera Indonesia.
- Wahab, A.A. 2006. "Pengembangan Konsep dan Paradigma PKn Baru Indonesia bagi Terbinanya Warganegara Multidimensional Indonesia", dalam *Pendidikan Nilai Moral Dimensi PKn*. Bandung: Laboratorium PKn FPIPS_UPI.
- Winataputra, Udin. S. 2001. *Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi (Studi Kajian Konseptual Dalam Konteks Pendidikan IPS)*. Disertasi

